

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MEMPERKOKOH PELAKSANAAN PILAR DEMOKRASI

**Oleh: H. A. Mulawangsa Mappakalu
Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai**

Abstrak

Selama tiga pesta demokrasi terakhir di negeri ini (1999, 2004 dan 2009), data partisipasi politik memperlihatkan angka yang menurun. Kondisi ini, mestinya dijadikan perhatian yang serius dan jangan dipandang dengan sebelah mata. Masalah partisipasi politik rakyat dalam setiap Pemilihan Umum, baik Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah, adalah simbol keberhasilan demokrasi. Oleh karenanya, bila partisipasi politik rakyat terus menurun, rasanya wajar kalau sistem demokrasi yang kita tempuh penting dikaji ulang.

Pemilhan Umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan demokrasi, dimana rakyat pada saat itu berdaulat, rakyat bebas menentukan pilihannya, menentukan pemimpinnya yang akan menjalankan atau mengelolah negara ini. Ini yang perlu terus ditekankan kepada masyarakat agar mau memenuhi haknya. Contoh di atas disetiap perhelatan pesta demokrasi apakah itu pemilu Legislatif, pemilu Presiden, dan Pilkada di setiap daerah propinsi, kabupaten/kota. Ini yang berbahaya jika masyarakat sudah bosan dan tidak mau lagi menggunakan haknya untuk datang di TPS (Tempat Pemungutan Suara), mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah.

Mereka cenderung akan menilai yang namanya pesta demokrasi tak ubahnya sebuah sandiwara politik. Mereka masih meragukan apakah para calon legislatif yang bakal dipilihnya itu adalah wakil rakyat atau wakil partai politik? Mereka juga banyak yang kecewa, karena apa-apa yang dijanjikan selama kampanye, tidak ada satu pun yang dibuktikannya. Jalan pintasnya, daripada ikut nyontreng, lebih baik berdiam diri di rumah. Mereka apatis melihat keadaan. Apalagi mereka merasakan secara esensial pengertian kekuasaan ditangan rakyat menjadi tak bermakna, kekuasaan rakyat hanya nampak dominan dan itu hanya sesaat saja, tatkala menentukan pilihannya di bilik suara, namun setelah itu, sepertinya rakyat sudah terlupakan, kurang terakomodir dalam kehidupan kenegaraan, oleh karena sistem demokrasi memberikan Power Full (kekuasaan yang sangat besar) kepada eksekutif dan legislatif (presiden dan DPR) karena nampak dalam berbagai kenyataan, kebijakan yang diambil bukan atas dasar kehendak rakyat, tetapi kebanyakan atas kehendak penguasa baik eksekutif maupun legislatif.

Menuju potret demokrasi yang makin berkualitas, partisipasi politik rakyat adalah salah satu ukuran yang sangat penting. Keikutsertaan rakyat telah memiliki hak politik pada setiap pesta demokrasi, pada dasarnya merupakan bukti bahwa pemerintah mampu mengajak rakyatnya untuk hidup berdemokrasi secara lebih berkualitas. Pemerintah terekam cukup berwibawa dimata masyarakatnya. Dan dipihak lain, rakyat pun memandang pemerintah layak untuk diikuti.

Parsipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan.

A. Pengertian Partisipasi Politik

Untuk memperjelas konsep arti dari partisipasi politik para ahli merumuskan beberapa rumusan tentang pengertian partisipasi politik sebagai berikut:

1. Harbert McClosky, dalam *International Encyclopedia of The Social Science*; Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.
2. Kevin R. Hardwick, partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antara warga negara dengan peme-

rintah dan terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

3. Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*; Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.
4. Michael Rush dan Philip Althoft, Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Indikatornya adalah berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.
5. Huntington dan Nelson, partisipasi politik ialah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Indikatornya adalah:

Oleh: H. A. Mulawangsa Mappakalu

- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.
- b. Subjek partisipasi politik adalah warga negara preman (*private citizen*) atau orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik.
- c. Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak.
- e. Partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan.
6. Ramlan Surbakti, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikatornya adalah keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa.
7. Prof. Miriam Budiharjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik; partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam

partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai kapasitas seseorang dalam upaya-upaya yang menentukan bagi kualitas hidup yang dijalaninya. Adjid (1985), mengartikan partisipasi sebagai kemampuan masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), pengertian partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan dan pengambilan keputusan.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional

dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond.

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan nonkonvensional.

1. Bentuk Konvensional

Bentuk konvensional antara lain:

- a. Dengan pemberian suara (*voting*)
- b. Dengan diskusi kelompok
- c. Dengan kegiatan kampanye
- d. Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e. Dengan komunikasi individu dengan pejabat politik/administratif
- f. Dengan pengajuan petisi

2. Bentuk Nonkonvensional

Bentuk nonkonvensional antara lain:

- a. Dengan berdemokrasi
- b. Dengan konfrontasi
- c. Dengan pemogokan
- d. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran
- e. Tindakan kekerasan politik manusia seperti penculikan/pembunuhan
- f. Dengan perang gerilya/revolusi

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:

- 1) Kegiatan pemilihan
- 2) Lobi
- 3) Kegiatan organisasi
- 4) Mencari koneksi
- 5) Tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga yaitu:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.

Oleh: H. A. Mulawangsa Mappakalu

- b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial dan pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.
- f. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi
- g. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah sebagaimana berikut:

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai leluhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai leluhur Pancasila.

Michael Rush dan Philip Althoff juga mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin, yakni sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administratif
- b. Mencari jabatan politik/administratif
- c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif organisasi semi politik

- a. Faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.
- b. Faktor politik. Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

1) Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu politik.

2) Kesadaran politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

3) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan mene-

tukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

4) Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelolah suatu objek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan kegunaan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *power of directing*. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan tuntutan mengenai pembangunan.

c. Faktor fisik individu dan lingkungan.

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi sosial antar berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

d. Faktor niali budaya. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik.

Menurut Dusseldorp (1994:10), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

C. Partisipasi Politik Kaitannya Dengan Alam Demokrasi

Kalau partisipasi politik masyarakat dimaknai bukan sekedar ilmu Pemilu/Pilkada tetapi partisipasi politik masyarakat mempunyai devinisi yang luas dari seluruh aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dan penyelenggaraan negara, keterlibatan warga dalam setiap tahapan kebijakan penyelenggaraan negara/pemerintahan, mulai dari sejak pembuatan keputusan, penilaian keputusan, termasuk juga dalam pelibatan implementasi dari suatu keputusan kebijakan. Kalau ruang-ruang tersebut di atas tersedia dan tidak ditutup oleh pemerintah maka pilar demokrasi akan tumbuh dengan subur, karena pada hakikatnya demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan menentukan kehidupannya

Oleh: H. A. Mulawangsa Mappakalu

sendiri dalam suatu negara. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi sekarang tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik, bahkan lebih daripada itu demokrasi harus menjadi sikap hidup masyarakat, tumbuh dan berkembangnya demokrasi bukan karena hanya diberi peluang oleh pemerintah, tetapi juga harus menjadi sikap hidup masyarakat sehari-hari.

Carter dan Herz dalam Ramlan Surbakti (1999:221) menggolongkan macam-macam sistem politik didasarkan pada kriteria siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Berdasar ini maka ada sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut “pemerintahan dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter maupun aristokrasi. Dipihak lain, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat yang

mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.

Ramlan Surbakti (1999: 222-232) juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Macam-macam sistem politik tersebut dibedakan dengan lima kriteria yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, memberikan kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama.

D. Sikap Hidup yang Demokratis

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup.

Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan ditingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE IUN (2003:112) menyebutkan demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai *mind set* dan setting sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup.

John Dewey (Zamroni, 2001:31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003:113) menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Wahyono (1991:227), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (Sri Soemantri: 1974).

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila dikalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966:9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.

Jika demokrasi merupakan nilai-nilai yang dihayati dan dibudayakan dalam sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008:118-119) mengidentifikasi adanya delapan nilai demokrasi yaitu:

1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela
2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis
3. Pergantian penguasa secara teratur
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin

Oleh: H. A. Mulawangsa Mappakalu

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman
 6. Penegakan keadilan
 7. Memajukan ilmu pengetahuan
 8. Pengakuan penghormatan atau kebebasan
- Karim (1996) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis, yang meliputi:
1. Inisiatif
 2. Disposisi resiprositas
 3. Toleransi
 4. Kecintaan terhadap keterbukaan
 5. Komitmen
 6. Tanggung jawab
 7. Kerja sama keterhubungan .

Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila dikanal masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu:

1. Toleransi
2. Kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat
3. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
4. Terbuka dalam berkomunikasi
5. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
6. Percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain
7. Saling menghargai
8. Mampu mengekang diri
9. Kebersamaan
10. Keseimbangan.

Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003:113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki tujuh norma yaitu:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad masing-masing
7. Pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan.

E. Penutup

Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan peranannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Partisipasi adalah elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara.

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebatas berupa mencoblos di bilik suara pada pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses kebijakan, mulai dari sejak formulasi pembuatan kebijakan, penilaian kebijakan, termasuk juga dalam pelibatan implementasi dari suatu kebijakan yang telah diputuskan bersama. Oleh karena itu pemerintah perlu membuka seluas-luasnya kesempatan kepada hak-hak masyarakat untuk

berpartisipasi, masyarakat didorong untuk memiliki kapasitas dan sumber-sumber daya yang layak untuk berpartisipasi, pemerintah menyiapkan jalur-jalur dan institusi-institusi politik dimana masyarakat mendapat akses untuk terlibat berpartisipasi.

Ini yang penting dipikirkan agar demokrasi bisa tumbuh berkembang seiring dengan partisipasi politik masyarakat yang bergairah sehingga kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat untuk memilih pada Pemilu/Pilkada dapat tumbuh kembali sehingga dapat memperkuat pelaksanaan demokrasi di negara yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Cheppy Hericahyono, 1986. *Ilmu Politik dan Prespektifnya*. Jakarta: PT. Tiara Wacana
- Cholil, Mansyur, 1987. *Sosiologi Masyarakat kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Cropley, A.J. 1998. *Pendidikan Seumur Hidup, Suatu Analisis Psikologis (Terj. Sardjan Kadir)*. Surabaya: Usaha Nasional
- Gany, A. Radi, 2001. *Demokrasi Masyarakat Nagari Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Nagari*. Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat Vol. 9 No. 22 Juni
- Lucian W. Pye, 1991. *Pengertian Pembangunan Politik dikutip oleh Juwono Sudarsono. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Marthis, Robert L. dan Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Hatta, Mohammad, 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Notoadmodjo, Soekidjo, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Huntington, Samuel, 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti
- Sartono, Kartdirdjo, 1987. *Transformasi Struktural Di Pedesaan. Beberapa Pokok Permasalahan dalam buku Prospek Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK-UGM
- Sumantri, Sri, 1974. *Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*. Bandung
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grafindo